

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT RajaGrafindo, Jakarta.
- Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sungkono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chaerudin, dkk, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Edi Setiadi dan Rena Yulia, 2010, *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Jakarta.
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2008, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- I.P.M Ranuhandoko, 2003, *Terminologi Hukum Inggris –Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Krisna Harahap, 2009, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Jalan Tiada Ujung*, Grafitri, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2011, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek dan Masalahnya*, PT. Alumni, Bandung.
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bima Aksara, Jakarta.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensier Indonesia* edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeradi, 2014, *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*, Graha ilmu, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960, Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15, Tahun 2006, Tentang Pemeriksaan Keuangan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3, Tahun 1971, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. INTERNET

<http://hedisasrawan.blogspot.co.id/2014/01/40-pengertian-sejarah-menurut-parahli.html?m=1>

<http://leip.or.id/mengupas-permasalahan-pidana-tambahan-pembayaran-uang-pengganti-dalam-perkara-korupsi/>

<http://www.kamuskbbi.id/kbbi/artikata.php?mod=view&Penjatuhan%20Pidana&id=49190-arti-maksud-definisi-pengertian-Penjatuhan%20Pidana.html/>

http://www.palembang.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=675:obiter-dicta-dalam-putusan-hakim-oleh--m-natsir-asnawi-shi--62-&catid=135:article&Itemid=182

Transparency International Indonesia (2017). Corruption Perceptions Index 2016. Terus Perkuat Integritas Sektor Publik, Dorong Integritas Bisnis Sektor Swasta. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/2017/01/25/corruption-perceptions-index-2016>.